



Fokus REDD

Peta situs web interaktif membuat fakta di balik kebakaran Sumatera transparan

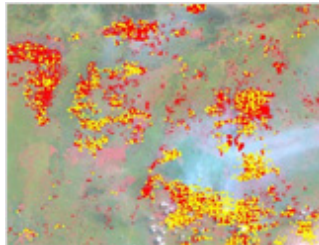
Sebuah alat bantu pemetaan online telah dirancang untuk mengungkap dampak kebakaran hutan di seluruh Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia memungkinkan para pengguna untuk menggali dan memvalidasi data awal. Alat bantu risiko kebakaran interaktif ini dikembangkan oleh Center for



International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan lokasi peringatan kebakaran NASA pada Juni, wilayah kebakaran (titik api coklat) yang dipetakan oleh CIFOR dengan menggunakan citra resolusi-tinggi dari satelit Landsat 8, dan citra satelit sebelum-dan-sesudah kebakaran yang menarik di wilayah Riau, wilayah terdampak paling buruk akibat kebakaran.

Data baru kebakaran Riau memberikan wawasan baru

CIFOR membuat analisis citra satelit baru untuk wilayah Provinsi Riau, Sumatera, yang tampaknya menjadi area yang paling parah terkena dampak akibat kebakaran yang menyebabkan masalah asap di Sumatera, Singapura dan Malaysia. Meskipun beberapa asesmen terbaru menggunakan peringatan kebakaran harian dari NASA untuk



menentukan letak kebakaran, kami menambahkan citra dengan resolusi lebih tinggi menggunakan satelit Landsat 8 yang baru diluncurkan guna memetakan titik api. Citra Landsat direkam pada 25 Juni 2013.

T&J soal kebakaran dan asap di Asia Tenggara

BOGOR, Indonesia (5 Juli, 2013) – Kebakaran di hutan dan bekas lahan hutan terjadi di Indonesia setiap tahun saat musim kering, khususnya di provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah. Asap menyebar ke negara-negara lain ini kebanyakan disebabkan oleh kebakaran di lahan gambut. Kebakaran berawal dan menyebar karena



berbagai alasan, sehingga sangat menyesatkan untuk berpikir bahwa "api" merupakan masalah—atau bahkan masalah tunggal. Faktor kompleksitas sosioekonomi, ekologi dan tata pemerintahan terlibat, berarti bahwa masalah—dan solusinya—berada di atas orang yang sebenarnya menyalakan api.

TENTANG REDD-INDONESIA

Situs web ini adalah media berbahasa Indonesia untuk berbagi pengetahuan mengenai hutan, perubahan iklim dan REDD+ di tanah air. Wadah ini, yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, berisi hasil penelitian, kemajuan proyek percontohan, berita, pelatihan, agenda kegiatan serta informasi terkini lainnya.

[Lihat REDD-Indonesia](#)

[Lihat Kementerian Kehutanan](#)

[Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan](#)

[\(Litbang\)](#)

[Lihat Pusat Standardisasi dan Lingkungan \(Pustanling\)](#)

[Lihat CIFOR](#)

[Lihat REDD desk](#)

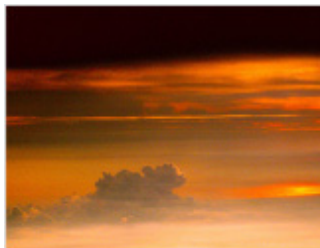
[Lihat REDD desk](#)



PUBLIKASI

Kebakaran Indonesia: Ilmuwan CIFOR berbicara tentang krisis asap

BOGOR, Indonesia (21 Juni, 2013)_ Sementara Indonesia telah mengambil langkah penting untuk melarang pembakaran skala besar bagi pembersihan lahan, isu asap saat ini menunjukkan kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih baik guna menghukum penyalahgunaan pembakaran lahan, kata Peter Kanowski, Wakil Direktur Jenderal Center for International Forestry Research. Berulanginya kebakaran dan asap lintas batas tetap menjadi masalah dan gejala akan kompleksnya isu tata pemerintahan di Indonesia, lanjutnya.



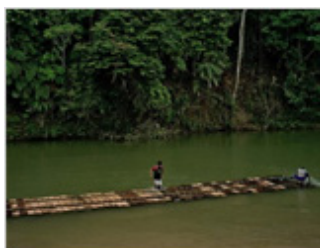
Key issues in REDD+ verification: Study commissioned by CIFOR



Conversion of intact peat swamp forest to oil palm plantation: Effects on soil CO₂ fluxes in Jambi, Sumatra

Lihat siapa yang tidak berbicara sekarang: Aliran informasi REDD+ di Indonesia

Proses kebijakan REDD + di Indonesia tidak memenuhi janjinya untuk berpartisipasi lebih dalam dan inklusivitas, menurut infobrief terbaru dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Terlepas dari kenyataan bahwa, dibandingkan dengan permasalahan kebijakan lain di Indonesia, REDD+ telah menarik dan melibatkan banyak beragam aktor selain pemerintah, termasuk dari LSM, lembaga donor dan sektor swasta.



Emissions factors: Converting land use change to CO₂ estimates

Verifikasi emisi REDD+ dapat diarahkan bagi pendanaan bantuan berbasis hasil

Kekhawatiran negara berkembang akan "bantuan bersyarat" dari REDD+, sebagai bantuan pembangunan yang dibayar berdasarkan jumlah pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca tertentu—menciptakan halangan dalam negosiasi iklim internasional, demikian menurut sebuah laporan terbaru. Suatu Penilaian Efektivitas REDD+ seharusnya dibuat untuk memverifikasi penurunan emisi pada tingkat nasional, sehingga target menjadi transparan dan terukur, kata Michael Dutschke, direktur konsultasi biokarbon, sebuah jaringan internasional pengelolaan bentang alam, iklim, dan keragaman hayati, dalam laporan terbarunya, "Key issues in REDD+ verification (Isu-isu kunci dalam verifikasi REDD+)".



Tropical wetlands for climate change adaptation and mitigation: Science and policy imperatives with special reference to Indonesia

Dana global akan menjadi cara efektif untuk menggerakkan program iklim REDD+: ahli

Upaya untuk menghentikan meningkatnya temperatur global bisa berhasil jika pengambil kebijakan menggunakan keseluruhan struktur pemerintahan untuk mengawasi REDD+ dari



Forests and climate change adaptation: What policymakers should know

awal mula pendanaan turun dari tingkat pemerintah ke proyek lokal, demikian menurut laporan riset terbaru. Cara terbaik mengelola REDD+, sebuah kerangka kerja dukungan PBB untuk mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi—tengah disengketakan secara politis, khususnya mengenai bagaimana pasar finansial dan pemerintahan seharusnya memainkan peran dalam skema.



Capacity development in national forest monitoring: Experiences and progress for REDD+

T+J: Bisakah program perubahan iklim REDD+ memberikan hasil terukur tiga tahun mendatang?

Para pengambil kebijakan harus melihat bahwa REDD+ dapat memberikan hasil terukur dalam tiga tahun mendatang guna menjamin kerangka kerja dukungan PBB dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi ini tetap selamat, demikian menurut ilmuwan kehutanan terkemuka. Walaupun masih dalam tahap dini, program ini telah mendorong debat kebijakan perubahan iklim dan revisi kebijakan kehutanan nasional sejak 2008. Walaupun menghadapi tekanan pendanaan akibat ketidakpastian ekonomi global akibat krisis finansial.



Mangrove adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis

Berita Kementerian Kehutanan

- 14 Juni 2013
Menhut sosialisasi program pro rakyat HTR, HKm dan KBR di Halsei
- 28 Juni 2013
Menhut Zulkifli Hasan pimpin langsung apel siaga kebakaran hutan dan lahan
- 28 Juni 2013
Presiden RI, Menteri Kehutanan dan Cristiano Ronaldo tanam mangrove di Bali
- 03 Juli 2013
Laporan perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan



Forest in a green economy: A synthesis

Peraturan dan kebijakan

- Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. SK.8/VII-PKH/2013, 14 Juni 2013
Standar pelayanan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. SK.9/VII-PKH/2013, 14 Juni 2013
Motto pelayanan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.32/Menhut-II/2013, 25 Juni 2013
Rencana makro pemantapan kawasan hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.34/Menhut-II/2013, 25 Juni 2013
Pedoman penanganan pengaduan internal (*whistleblower system*) dan eksternal (pengaduan masyarakat) atas tindak pidana korupsi di



Local mitigation actions supporting the low emission development plan in Kutai Barat district, Indonesia – Initial process



Perancangan aksi mitigasi untuk mendukung rencana pembangunan rendah emisi di kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Siaran Pers

- 05 Juli 2013
Kemenhut akan jadikan kerjasama pengelolaan hutan dengan masyarakat sebagai model pengelolaan hutan di luar Jawa
- 21 Juni 2013
Jambi dan Kalimantan Timur sepakati penataan perizinan kebun dan tambang
- 20 Juni 2013
Kemenhut bekerjasama dengan Orangutan Foundation International (OFI) lepasiarkan Orangutan
- 19 Juni 2013
Global Symposium Discusses the Integration of REDD+ into Green Economy
- 06 Juni 2013
Aksi perubahan iklim masih jauh dari target



Predicting future conflict under REDD+ implementation



Dinamika wacana perubahan iklim dan keterkaitannya dengan hukum dan tenurial di Indonesia: Sebuah kajian kepustakaan

Pelatihan/Seminar

- 06 Mei 2013, Merauke
Lokakarya MP3EI dan pembangunan rendah emisi
- 10 Juni 2013
TNA mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 19 - 20 Juni 2013, Jakarta
Global symposium discusses the integration of REDD+ into a green economy
- 21 Juni 2013, Jakarta
Indonesian roundtable on greening the national development plan
- 25 - 27 Juni 2013, Lombok
The tenth UN-REDD Programme Policy Board meeting
- 03 Juli 2013
Dialog pertama pasal 6 UNFCCC di Bonn



Tenurial dalam perdebatan REDD: Pokok persoalan atau hanya pelengkap?

Publikasi Lainnya



Pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia



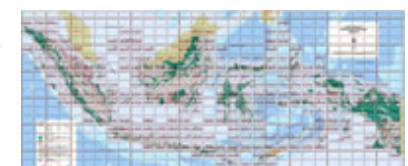
Methodology design document for reducing emissions from deforestation and degradation of undrained peat swamp forests in Central Kalimantan, Indonesia



Mula daun kering, pengendali gulma dan penyubur tanah di hutan tanaman



Strategi dan rencana implementasi pengukuran, pemantauan, dan pelaporan yang terverifikasi (MRV) untuk REDD+ Indonesia



Geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru revisi 3, Zip format



REDD Kalkulator



Peluang dan kebijakan pengurangan emisi: Sektor manufaktur



Policy assessment - Initial assessment of MRV institutional development



Policy brief - Menyoroti perlunya kesiapan *capacity building* di Indonesia



REDD+ and a green economy: Opportunities for a mutually supportive relationship

Jika anda mengalami masalah dengan format email ini, [klik di sini](#) untuk format PDF.
Kami mengharapkan umpan balik dan saran anda berkenaan dengan REDD-Indonesia dan berbagai laporan penting yang kami muat dalam edisi ini. Kirimkan masukan anda ke [pengelola situs REDD-Indonesia](#).